

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pertumbuhan aktiva, efisiensi dan kinerja keuangan BUMD di Provinsi DIY, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aktiva BUMD/perusahaan daerah di Provinsi DIY. Penyertaan modal yang diberikan belum mampu meningkatkan pertumbuhan aktiva BUMD/perusahaan daerah di Provinsi DIY.
2. Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap efisiensi BUMD di Provinsi DIY. Keberadaan Penyertaan modal belum mampu menciptakan efisiensi pada BUMD/perusahaan daerah di Provinsi DIY.
3. Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BUMD di Provinsi DIY. Dengan adanya penyertaan modal yang diberikan, justru kinerja keuangan mengalami penurunan.

V.2 Ketercapaian Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yakni menguji kembali model riset yang dilakukan oleh Sudarno, dkk (2010) dengan obyek yang berbeda pada BUMD di Provinsi DIY, penulis menemukan beberapa hasil yang sama. Untuk pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva dan kinerja keuangan, penulis menemukan bahwa penyertaan modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aktiva dan kinerja keuangan. Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarno, dkk (2010) yang menemukan bahwa terdapatnya hubungan negatif antara penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pertumbuhan aktiva dan kinerja keuangan BUMD di Provinsi Riau. Sedangkan untuk pengaruh penyertaan modal terhadap efisiensi, penulis menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarno, dkk (2010) di Provinsi Riau dimana belum terdapatnya pengaruh yang signifikan antara penyertaan modal yang diberikan terhadap efisiensi pada BUMD di Provinsi DIY, dan penyertaan modal tidak signifikan terhadap efisiensi.

V.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan keterbatasan dalam hal teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data di basis data. Sehingga dalam melakukan analisis data dan pengambilan keputusan didasarkan pada data yang terkumpul di basis data. Bagi penulis teknik ini sudah cukup

memadai dan lengkap dalam memperoleh data penelitian. Namun, akan lebih baik apabila teknik pengumpulan data dilengkapi dengan teknik wawancara sehingga lebih mempermudah dalam memperoleh informasi tambahan.

V.4 Saran

Setelah melakukan penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya :

Penelitian berikutnya dapat mempergunakan seluruh teknik pengumpulan data yang ada. Selain pengumpulan data di basis data, teknik wawancara dan kuesioner dapat dipergunakan sehingga lebih mempermudah dalam proses pengumpulan data penelitian.

2. Penerapan pada BUMD di Provinsi DIY :

Dalam hal pemberian penyertaan modal dari pemerintah daerah, pihak BUMD perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah selaku pemilik (pemegang saham), harus dipahami sebagai modal yang tidak berasal dari pinjaman (*zero debt*). Sehingga, tidak menjadi beban bagi BUMD dalam hal pengembalian tetapi dapat dipergunakan untuk tujuan peningkatan pertumbuhan aktiva yang lebih baik.

- Dalam hal peningkatan pertumbuhan aktiva, BUMD harus lebih berfokus pada investasi-investasi yang produktif. Dengan melakukan investasi yang produktif, maka akan memperoleh pengembalian yang produktif dan efektif bagi BUMD itu sendiri.
- Dalam hal penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap efisiensi, BUMD perlu melakukan penghematan biaya (efisien), mengurangi biaya operasional maupun non operasional serta lebih meningkatkan jumlah pendapatan perusahaan.
- Dalam hal peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik, pihak BUMD perlu melakukan perampingan organisasi, optimalisasi bidang bisnis, peningkatan aktiva produktif, serta mengurangi *inefisiensi*.

Daftar Pustaka

- Acuviarta. (2006). BUMD di Sarang Penyamun. *Jurnal Free List*, Bandung.
- Ahmad, dan Kamarudin. (2004). *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta, Indonesia : Rineka Cipta.
- Anwar, M. (2007). *Peran Struktur Kepemilikan Dan Struktur Dewan Komisaris dalam Mekanisme Corporate Governance terhadap Keputusan Pendanaan dan Kinerja Perusahaan Go Public di Indonesia : Perspektif Agency Theory*. Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Brigham, F.E., and Houston. F.J. (2001). *Manajemen Keuangan*. Jakarta : Erlangga.
- Budisatrio, T. (2000). Implikasi Lingkungan Usaha dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. *Jurnal Majalah Usahawan* No. 6 TH XXIX Juni 2000 hal 7-16, Universitas Indonesia.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 Tentang *Kepengurusan BUMD*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Indonesia : UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- fajrifeunj.blogspot.com/2009/09/modul-kwu-kelas-2-no1.html
- <https://investasidaerah.wordpress.com>. (23 Juli 2013), *Apakah SKPD, BLUD atau BUMD?*
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_B.Badan_Usaha_Milik_Daerah\(BUMD\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_B.Badan_Usaha_Milik_Daerah(BUMD)).
- <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-kinerja-keuangan.html>
- Jogiyanto. (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta, Indonesia: BPFE UGM.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang *Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah*.
- Kusumaningrum. (2010). *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Aset dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang.

Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK. 06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.

Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 4 Juni 2002 hal 1-15.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555.

Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang *Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang *Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008, Tentang *Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunungkidul*.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 Tentang *Perusahaan Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul*.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 Tentang *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1994 Tentang *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul Pada Pihak Ketiga*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2007 Tentang *Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2011 Tentang *Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2003 Tentang *Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 Tentang *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo, dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo*.

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang *Ketentuan – Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah*.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang *Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Sudarno, dkk. (2010). “Pengaruh Penyertaan Modal Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, dan Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. *Jurnal Aplikasi Manajemen* Volume 9 Nomor 2.

Sunarsip (2009). “Membuka Belunggu BUMD”. *Jawa Pos Group*. 13 Maret 2009.

www.bantulkab.go.id. htm. (Rabu, 4 Juli 2012, 14:07 WIB). “*Harapan Bupati, BUMD Kabupaten Bantul Agar Dapat Berkiprah Secara Dominan*”.

www.tribunjogja.htm. (Jumat, 8 Juni 2012, 22:03 WIB). “*Dua BUMD DIY Tak Beri Kontribusi PAD*”.

www.harianjogja.com. (Senin, 18 Februari 2013, 09:53 WIB). “*BUMD = Badan Usaha Membebani Daerah*”.

www.tribunjogja.com. (Selasa, 3 Juni 2014, 16:08 WIB). “*Dua Tahun Aneka Dharma Tak Setor ke Pemkab Bantul*”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang *Perusahaan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang *Otonomi Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas.*

